

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, penulis memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai Kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif 2019 (Studi Deskriptif Kualitatif di KPU Provinsi DKI Jakarta) sebagai berikut:

Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif 2019 di KPU Provinsi DKI Jakarta berjalan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan pada Jadwal Pemilu 2019 oleh KPU RI. Dalam pelaksanaannya, KPU Provinsi DKI Jakarta telah bekerja dengan optimal dalam mensukseskan program-program pada tiap rangkaian Pemilu 2019.

Berdasarkan data yang diambil dari Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2019 Tingkat Provinsi DKI Jakarta dari 8.109.772 Data Pemilih di DKI Jakarta, jumlah Partisipasi Pemilih di Pemilu Legislatif 2019 adalah 6.358.924 jiwa. Maka dalam persentase keseluruhan KPU Provinsi DKI pada Pemilu Legislatif 2019 adalah 78% sehingga menggambarkan peningkatan Partisipasi Pemilih sebanyak 18% dibandingkan pada Pemilu 2016 yaitu 60%.

Tentu dalam pelaksanaan tiap tahapan pada Pemilu Legislatif memiliki permasalahan. Namun secara keseluruhan terdapat beberapa faktor penghambat dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif 2019 di KPU Provinsi DKI Jakarta antara lain terdapat pada tahapan: *Pertama*, Perencanaan program dan

anggaran. *Kedua*, Penyusunan Peraturan KPU serta pembahasan didalam peraturan tersebut. *Ketiga*, teknis pada tahapan Pemilihan Umum Legislatif.

Namun, faktor pendukung secara keseluruhan dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif 2019 di KPU Provinsi DKI Jakarta membuat pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, aman dan profesionalitas. Faktor pendukung berupa: *faktor internal* yaitu sumber daya manusia (SDM) baik dari anggota KPU, petugas KPU termasuk PPS dan KPPS KPU selama Pemilihan Umum Legislatif 2019 dan *faktor eksternal* yaitu berupa bantuan lembaga-lembaga pemerintah dan non-kepemerintahan selama Pemilihan Umum Legislatif 2019 di KPU Provinsi DKI Jakarta.

Rekomendasi kedepannya untuk Pemilu Legislatif 2019 menurut KPU Provinsi DKI Jakarta adalah terkait Undang-Undang mengenai Pemilihan Umum yang jauh lebih matang persiapan dan pembahasannya sehingga tidak menimbulkan permasalahan saat Penyelenggaraan Pemilihan Umum berjalan. Selain itu, beban kerja para petugas KPU atau Badan Pembentukan Penyelenggara termasuk didalamnya KPPS KPU. Perlu adanya perbaikan anggaran yang ada selain itu beban kerja yang terlalu berat pada Pemilu 2019 dalam teknis pemungutan dan perhitungan suara serta rekapitulasi suara yang menewaskan ratusan petugas.

Implikasi dari penelitian mengenai Kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif 2019 di KPU Provinsi DKI Jakarta adalah dapat menjadi gambaran ketercapaian pemilihan umum legislatif 2019 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta berdasarkan kinerja selama

pelaksanaan tahapan Pemilu Legislatif 2019 serta evaluasi untuk Pemilihan Umum Legislatif mendatang.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti memberikan saran yakni sebagai salah satu lembaga Penyelenggara Pemilu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta dapat lebih menjembantani KPU Pusat dengan KPU Kabupaten/Kota terkait teknis pelaksanaan Pemilu Legislatif yang merujuk pada peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan permasalahan bagi anggota KPU baik itu didalam sekretariat maupun ditingkat terendah. Sehingga kedepannya berbagai permasalahan yang timbul selama Pemilu Legislatif dapat diminimalisir.

